

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN STUNTING DI KABUPATEN MALAKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Yansen Alther Maromon

NPP. 32.0677

Asdaf Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Email: 32.0677@prajaipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dr. Imelda Hutasoit, M.Kes, M.A

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Stunting is a chronic nutritional problem that requires a collaborative cross-sector approach. In Malaka Regency, East Nusa Tenggara Province, stunting remains a significant health issue despite various initiatives, indicating gaps in stakeholder coordination and implementation strategies. **Purpose:** This research aims to analyze the implementation of Collaborative Governance in stunting management in Malaka Regency, East Nusa Tenggara Province using Ansell and Gash's (2008) theory. **Method:** The research employs a descriptive qualitative method with data collection techniques through in-depth interviews and observation of stakeholder interactions and program implementation. **Result:** The research findings indicate that collaboration among stakeholders in stunting management is not yet optimal. The initial conditions dimension reveals limitations in stakeholder equality and active participation. Facilitative leadership has been attempted through routine meetings but is not entirely effective. The institutional design shows various regulations from central to local levels, but lacks specific Standard Operating Procedures (SOPs) for programs. The collaboration process has demonstrated some achievements through programs such as Supplementary Feeding (PMT), risk family assistance, and local food-based Infant and Child Feeding Education (PMBA). However, cross-sector coordination remains weak, with a tendency for each institution to work separately. **Conclusion:** Collaborative governance in stunting management in Malaka Regency requires significant improvement. The research suggests the need for comprehensive SOP development, improved stakeholder coordination, and optimization of each stakeholder's role in accelerating stunting reduction efforts in Malaka Regency.

Keywords: Collaborative Governance; Stunting; Stakeholders; Cross-Sector Coordination

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Stunting merupakan permasalahan gizi kronis yang membutuhkan pendekatan kolaboratif lintas sektor. Di Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, stunting masih menjadi masalah kesehatan yang signifikan meskipun berbagai inisiatif telah dilakukan, menunjukkan adanya kesenjangan dalam koordinasi pemangku kepentingan dan strategi implementasi. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi *Collaborative Governance* dalam penanganan stunting di Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur menggunakan teori

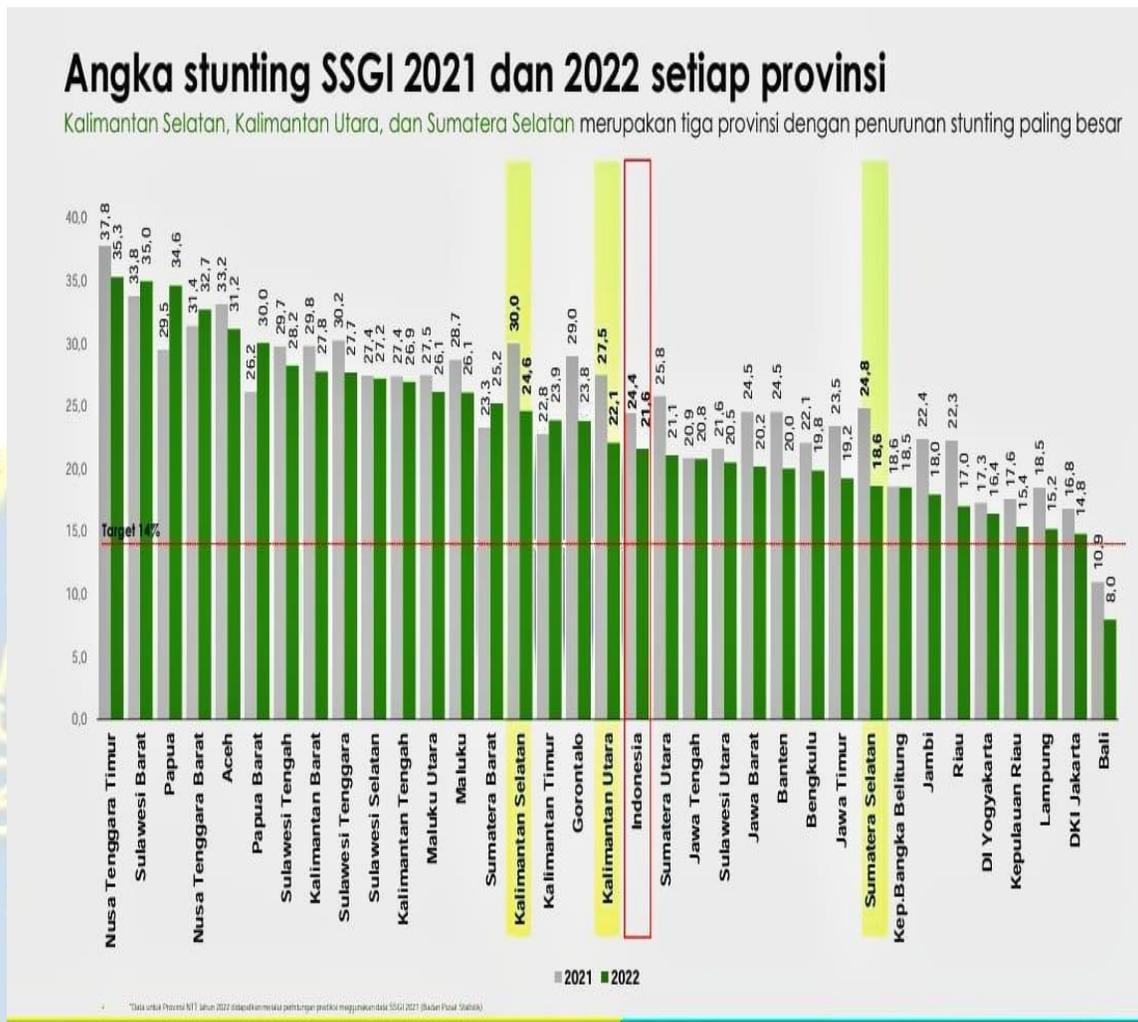
Ansell and Gash (2008). **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap interaksi pemangku kepentingan dan implementasi program. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam penanganan stunting belum optimal. Dimensi kondisi awal menunjukkan keterbatasan kesetaraan dan partisipasi aktif antar stakeholder. Kepemimpinan fasilitatif telah diupayakan melalui pertemuan rutin, namun belum sepenuhnya efektif. Desain kelembagaan memperlihatkan adanya berbagai peraturan dari tingkat pusat hingga daerah, tetapi kurangnya Standar Operasional Prosedur (SOP) spesifik untuk program. Proses kolaborasi telah menunjukkan beberapa capaian melalui program-program seperti Pemberian Makanan Tambahan (PMT), pendampingan keluarga berisiko, dan pendidikan Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) berbasis pangan lokal. Namun, koordinasi lintas sektor masih lemah dengan kecenderungan masing-masing lembaga bekerja secara terpisah. **Kesimpulan:** *Collaborative governance* dalam penanganan stunting di Kabupaten Malaka memerlukan perbaikan signifikan. Penelitian menyarankan perlunya penyusunan SOP yang komprehensif, peningkatan koordinasi antar stakeholder, serta optimalisasi peran setiap pemangku kepentingan dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Malaka. **Kata kunci:** *Collaborative Governance*; Stunting; Pemangku Kepentingan; Koordinasi Lintas Sektor

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

The global prevalence of childhood linear growth retardation, commonly measured as stunting, has declined over the last decades, but remains unacceptably high (Bhutta et al., 2020). Indonesia sebagai negara berkembang masih menghadapi permasalahan seputar kesehatan dengan adanya masalah penyakit dan masalah gizi. *Undernutrition increases susceptibility to illness and fatality, and if removed, 45% of child deaths would not occur* (Leroy & Frongillo, 2019). Permasalahan gizi yang masih belum terselesaikan dan menjadi prioritas saat ini adalah stunting (Siswanto et al., 2020). Stunting adalah kondisi anak yang ditandai dengan kurangnya tinggi badan dibandingkan pada anak-anak pada umumnya sesuai dengan standar umur (UNICEF, 2020). Definisi lain menyebutkan bahwa *linear growth stunting, defined as a height-for-age z score (HAZ) ≥ 2 SDs below the median, is an easily recognizable and quantifiable physical indicator of chronic childhood malnutrition* (Vaivada et al., 2020). Stunting menurut Siswati (2018) merupakan kondisi dimana anak mengalami kegagalan pertumbuhan dan perkembangan yang diakibatkan kurangnya gizi (malnutrisi) dan infeksi yang berulang pada saat 1000 Hari Pertama Kehidupan dalam kehidupan anak yang diperhitungkan dengan panjang badan dibanding umur dan tinggi badan dibanding umur melalui batas z score -2 dari standar deviasi. Stunting menjadi permasalahan penting karena menurut Survei Status Gizi Indonesia (2022) prevalensi stunting di Indonesia masih sebesar 21,6% dimana mengejar target prevalensi stunting 14% pada tahun 2024 sesuai dengan RPJMN. Oleh karena itu Indonesia memiliki tantangan untuk menurunkan stunting setiap tahunnya sebesar 3,8% untuk mencapai target yang ditetapkan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022).

Gambar 1 Prevalensi Stunting Setiap Provinsi Indonesia



Sumber: Diolah Penulis dari Survei Status Gizi Indonesia, 2022

Berdasarkan Hasil Survei Status Gizi Indonesia Data tersebut, menunjukkan bahwa terdapat 16 provinsi yang telah melewati angka prevalensi Indonesia pada tahun 2022 dimana prevalensi stunting Indonesia sebesar 21,6% yang dijadikan acuan batas prevalensi provinsi. Dari 16 provinsi dengan prevalensi stunting tinggi, Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi di Indonesia tahun 2022.

Dengan prevalensi stunting sebesar 35,3%, Nusa Tenggara Timur memerlukan perhatian serius dan upaya ekstra untuk mengatasi masalah gizi kronis ini. Berdasarkan Peraturan Gubernur NTT Nomor 71 Tahun 2019 tentang Aksi Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting di Provinsi NTT Tahun 2019-2023 dan Keputusan Gubernur NTT Nomor 115 A/KEP/HK/2022 tentang Tim Penurunan Stunting Provinsi NTT, Provinsi Nusa Tenggara Timur menarik untuk dijadikan lokasi penelitian.

Tabel 1 Prevalensi stunting berdasarkan Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 dan 2023

No.	Kabupaten/Kota	Prevalensi Stunting	
		2021	2023
1.	Flores Timur	23,4%	37,2%
2.	Kota Kupang	28,1%	29,9%
3.	Sika	26,6%	33,3%
4.	Ende	27,2%	27,5%
5.	Nagekeo	28,1%	24,9%
6.	Sumba Timur	28,8%	26,3%
7.	Ngada	29,0%	21,3%
8.	Malaka	31,4%	47,7%
9.	Lembata	31,7%	35,1%
10.	Manggarai	33,1%	36,8%
11.	Sabu Raijua	33,9%	36,9%
12.	Sumba Tengah	34,0%	39,5%
13.	Sumba Barat	37,0%	42,5%
14.	Manggarai Barat	38,5%	36,2%
15.	Belu	39,9%	48,1%
16.	Rote Ndao	40,1%	39,8%
17.	Kabupaten Kupang	40,4%	40,4%
18.	Manggarai Timur	42,9%	42,7%
19.	Sumba Barat Daya	44,0%	44,3%
20.	Alor	44,8%	39,3%
21.	Timur Tengah Utara	46,7%	42,7%
22.	Timur Tengah Selatan	48,3%	50,1%

Sumber : Diolah Penulis Dari Hasil Survei Status Gizi Indonesia, 2021 dan 2023

Berdasarkan data prevalensi tersebut, terdapat 10 kabupaten yang masih memiliki prevalensi tinggi yaitu Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Alor, Sumba Barat Daya, Manggarai Timur, Rote Ndao, Belu, Sumba Barat, Sumba Tengah, Malaka. Dari 10 kabupaten tersebut, penulis ingin melakukan penelitian pada Kabupaten Malaka dikarenakan permasalahan stunting di Kabupaten Malaka meningkat 16,3% dari tahun 2021 sebesar 31,4% menjadi 47,7% tahun 2023. Dari peningkatan yang cukup signifikan ini, penulis tertarik dengan adanya permasalahan dan bagaimana upaya penanggulangan stunting di Kabupaten Malaka sehingga angka stunting dapat meningkat dan jauh dari target nasional sebesar 14% (Perpres No 72 Tahun 2021). Sehubungan dengan data stunting balita selama tiga tahun terakhir di Kabupaten Malaka, data dibawah menunjukkan bahwa jumlah balita stunting di Kabupaten Malaka masih cukup tinggi dan belum mencapai target nasional. Meskipun angka stuntingnya tinggi, ada tren penurunan stunting yang positif, tetapi masih perlu ditingkatkan

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Permasalahan stunting yang terjadi di Kabupaten Malaka merupakan masalah multisektor, dimana permasalahan tersebut terjadi akibat dari; (i) faktor ekonomi, sosial dan budaya, (ii) gizi ibu saat hamil, (iii) kurangnya asupan gizi, (iv) kurangnya asi eksklusif, (v) pola asuh yang kurang optimal, (vi) akses mutu pelayanan kesehatan yang kurang baik, (vii) serta kebutuhan air bersih dan sanitasi yang layak (Diskominfo, 2022). Masalah pertama pada aspek ekonomi, sosial dan budaya. Stunting memberikan risiko buruk terhadap pendidikan anak, seperti yang terjadi pada negara Brasil, Guatemala, India, Filipina, dan Afrika Selatan terdapat orang dewasa yang mengalami stunting pada umur 2 tahun tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai dengan waktu pendidikan pada umumnya karena terdapat satu tahun lebih perbedaan pada anak yang tidak terjangkau stunting. Stunting menyebabkan total pendidikan rendah, dan prestasi ujian yang rendah (*World Health Organization*, 2014). Masalah ekonomi seperti pendapatan keluarga, jumlah anggota keluarga yang mempengaruhi pengeluaran, dan kemampuan memberikan asupan makanan sesuai dengan kemampuan dana untuk memenuhi gizi anak (Siswati, 2018). Kemiskinan adalah masalah ekonomi yang mempengaruhi stunting, menurut BPS (2022) terdapat 151,08 ribu jiwa penduduk miskin di Kabupaten Malaka, sedangkan sosial budaya merupakan penyebab stunting dimana terdapat budaya tertentu yang mengharuskan seseorang dilarang memakan sesuatu yang akhirnya membatasi gizi anak (Aisyah, 2022), seperti di Malaka terdapat larangan atau pantangan bagi warga Malaka asli memakan ikan lele yang dianggap warga Malaka dari kesulitan pada sejarah terdahulu, sementara ikan lele memiliki banyak manfaatnya untuk gizi. Faktor gizi ibu saat hamil merupakan salah satu faktor yang menyebabkan stunting. Pada pelaksanaan kegiatan skrining stunting yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Malaka diperoleh hasil skrining pada ibu hamil dengan populasi 5970 dimana 2982 merupakan ibu dengan kondisi gizi masih normal, 2507 gizi perlu pengawasan, dan 456 gizi buruk (PMD Malaka, 2023). Gizi buruk adalah masalah ketiga yang mempengaruhi adanya stunting. Gizi merupakan indikator kesehatan dalam SDGs (*Sustainable Development Goals*) adalah status gizi balita. Status gizi balita diukur melalui umur, berat badan, dan tinggi badan. Berdasarkan indikator tersebut gizi menyebabkan adanya stunting, *underweight*, dan *wasting*. Kabupaten Malaka melalui data yang diperoleh sementara terdapat anak penderita stunting masih 27,5%, *underweight* 7,98%, dan *wasting* 7,11% (Dinas Kesehatan, 2022). Masalah keempat mengenai pemberian asi eksklusif yaitu pemberian asi yang dilakukan oleh ibu kepada anak dari usia bayi baru lahir hingga usia 6 bulan tanpa digantikan makanan atau minuman lainnya. Asi eksklusif dapat mempengaruhi adanya perkembangan bayi. Namun pemberian asi eksklusif di Kabupaten Malaka sendiri masih kurang optimal dimana dari tahun 2021 menuju tahun 2022 capaian pemberian asi eksklusif menurun dari 78% tahun 2021 menjadi 75% tahun 2022 data tersebut tercantum dalam profil kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Dinas Kesehatan, 2022). Selain itu, menurut Pusung *et al.* (2024), dalam jurnal berjudul "*Mapping environmental problems in the new capital city of "Nusantara" as a foundation for sustainable development governance*," kualitas lingkungan telah menurun. Pencemaran lingkungan yang dapat menyebabkan stunting di berbagai wilayah, termasuk padatan pemukiman dan kondisi sanitasi lingkungan yang buruk, serta limbah industri yang dibuang langsung ke lingkungan tanpa pengolahan. Salah satu contohnya adalah Kabupaten Malaka.

Pembentukan tim sebagai unsur penting penurunan stunting juga telah dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Malaka. Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting maka dibentuklah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang diatur dalam Keputusan Bupati Malaka Nomor: 188/133/KEP/413.013/2022 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Malaka. Tim tersebut dibentuk bertujuan untuk menyelenggarakan perkembangan berkelanjutan percepatan penurunan stunting dilakukan secara

holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergis, dan sinkronisasi antara perangkat daerah, desa dan pemangku kepentingan guna mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif (Ro'is, 2022). Berdasarkan tim yang telah dibentuk tersebut dapat terlihat bahwa Pemerintah Kabupaten Malaka bekerja sama dengan berbagai pihak non pemerintahan dalam penurunan stunting. Kolaborasi dengan non pemerintahan terdiri dari Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Persatuan Ahli Gizi Indonesia, Koalisi Kependudukan Indonesia, LSM Bethesda, Penyuluh Keluarga Berencana, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Perawat Nasional (PPN), Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan (HAKL) serta berkolaborasi dengan Komandan Komando Distrik Militer (KODIM) dan Kepala Kepolisian Malaka (Nursiyanto, 2022). Program penanganan stunting yang terdiri dari Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Malaka. Ketua TP PKK merupakan ketua dari program 1-10-100 yang berperan sebagai penanggung jawab seluruh jalannya program. Selanjutnya terdapat dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dimana salah satu anggota (IDI) ada dr. fina yang berperan sebagai ahli kesehatan yang memberikan penyuluhan dengan memaparkan terkait penanganan stunting. Masyarakat ikut berperan dan menjadi obyek ataupun sebagai sebagian dari orang tua asuh penderita stunting yang untuk menerapkan aturan yang diberikan bagi penderita stunting/obyek dan melaksanakan arahan terkait program seperti orang tua asuh yang melaksanakan peran untuk monitoring anak penderita stunting yang diasuh (Ro'is, 2023).

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks tingkat *collaborative governance*. Penelitian Yuni Kurniasih, Sri Suwitri, dan Septiana Wulan Hapsari pada tahun 2023 yang berjudul “*Collaborative Governance* Dalam Percepatan Pencegahan Stunting di Kabupaten Temanggung,” menemukan bahwa terdapat satu aksi yang belum dapat direalisasikan yaitu penyusunan peraturan Bupati atau walikota, selain itu terdapat hambatan dalam internal yaitu ketidakhadiran anggota dalam forum diskusi karena jadwal yang bersamaan serta perubahan anggota dikarenakan mutase pegawai (Yuni Kurniasih, 2023).

Penelitian Ipan, Hany Purnamasari, Evi Priyanti pada tahun 2021 yang berjudul “*Collaborative Governance* dalam Penanganan Stunting,” menemukan bahwa proses kolaborasi akan dapat memotivasi para stakeholder yang terlibat untuk berbuat dan berinovasi untuk pencapaian tujuan penurunan stunting di UPTD Puskesmas Ciampel (Ipan, Hany et al., 2021).

Penelitian Nindya Tiara Fatikha, dan Ane Permatasari pada tahun 2023 yang berjudul “*Collaborative Governance* dalam Penanganan Stunting.” Hasil yang didapatkan kurang optimalnya kolaborasi antara kementerian dan lembaga pemerintah pusat maupun daerah (Nindya Tiara, 2023).

Penelitian Qori Hidayasa, Fitri Kurnianingsih, dan Agus Hendrayady pada tahun 2023 yang berjudul “*Collaborative Governance* dalam Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Bintan.” Hasil penelitian yang didapat membuktikan bahwa Perlu ditekankan upaya dalam membangun kepercayaan bersama masyarakat serta pemahaman dari para pemangku kepentingan dalam memahami tupoksi tugas masing- masing (Qori Hidayasah, 2023).

Penelitian Evalia Nuranita Putri dan Herbasuki Nurcahyanto pada tahun 2019 yang berjudul “*Collaborative Governance* dalam Penanggulangan Stunting di Desa Kalirandu Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang.” Hasil yang didapatkan berupa terdapat hambatan pada sumber daya manusia, komitmen kepala desa rendah, dominasi sektor kesehatan, dan masalah pengunggahan data (Evalia, 2019).

Penelitian Sukanti, dan Nur Faidanti pada tahun 2021 yang berjudul “*Collaborative Governance*

Dalam Upaya Penanggulangan Stunting di Kabupaten Sleman.” Hasil yang ditemukan menunjukkan belum tersedia forum komunikasi secara khusus di tingkat Pemerintah Kabupaten dan masih kurangnya peran swasta (Sukanti., 2021).

Penelitian Faldianus Alvinolatu pada tahun 2022 yang berjudul “*Collaborative Governance* Dalam Upaya Penanggulangan Masalah Stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur.” Hasil yang ditemukan menunjukkan terjadi kolaborasi cangkang dimana ada masalah di manajemen ketatalaksana dan kelembagaan (Faldianus, 2022).

Penelitian Chamid Sutikno dan Alban Naufal pada tahun 2023 yang berjudul “Proses *Collaborative Governance* Penanggulanagn Stunting di Desa Winduaji, Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes.” Hasil yang ditemukan menunjukkan Collaborative governance telah mampu menurunkan angka stunting. (Chamid Sutikno., 2023).

Penelitian Winda Anggraeni pada tahun 2022 yang berjudul “*Collaborative Governance* Dalam Program Penanganan Stunting.” Hasil yang ditemukan menunjukkan pelaksanaan program dalam collaborative governance telah berjalan dengan konvergensi. (Winda., 2022).

Penelitian Ahmad Saufi pada tahun 2021 yang berjudul “*Collaborative Governance* dalam Penanggulangan Stunting Ditengah Covid-19..” Hasil yang ditemukan menunjukkan lemahnya dukungan dan pemerintah masih bersifat sentralistik dan dominan pada penguasaan sumber daya, menjadikan kolaborasi tidak berjalan dengan baik (Ahmad Saufi., 2021).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni proses *collaborative governance* terhadap program Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugasnya dan menyelenggarakan sistem pemerintahan daerah dengan konsep *collaborative governance*. Metodenya yang digunakan menggunakan kualitatif dengan analisa data berbeda dengan penelitian Kurniasih et al., 2023, Purnamasari et al., 2021, Fatikha & Permatasari, 2023, Hidayasa et al., 2023, Putri & Nurcahyanto, 2019, Sukanti & Faidati, 2021, Latu, 2022, Sutikno & Naufal, 2023, Anggraeni, 2022, Saufi, 2021. Penelitian sebelumnya tersebut disusun berdasarkan objek penelitian, tujuan penelitian, teori dan metode yang digunakan, persamaan dan perbedaan penelitian serta hasil penelitian. Tujuan penyusunan penelitian sebelumnya adalah untuk memudahkan penulis dalam mengetahui perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis nantinya. Terdapat sepuluh penelitian tersebut ditemukan persamaan dan perbedaan. Persamaan terdapat pada pada objek, teori dan metode yang digunakan yaitu terkait objek stunting dengan teori *Collaborative Governance* melalui metode kualitatif deskriptif. Namun terdapat perbedaan pada lokus dan fokus penelitian, serta teori yang digunakan terdapat 3 penelitian yang menggunakan teori dari Emercon, Nabatchi, dan Balogh yaitu penelitian oleh Kurniasih et al., 2023, Fatikha & Permatasari, 2023, Saufi, 2021, untuk 7 penelitian lainnya menggunakan teori oleh Ansell and Gash, Selain itu, perbedaan lainnya yaitu perbedaan terlihat jelas bahwa fokus dari setiap penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan penulis ini berbeda. Dalam penelitian ini nantinya akan berfokus pada bagaimana *collaborative governance* dalam penurunan stunting tersebut berjalan. Mulai dari cara kerja hingga strategi apa yang digunakan oleh seluruh pemangku kepentingan dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Malaka.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan *collaborative governance* dalam penanganan stunting di Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menganalisis data. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam melaksanakan pengamatan adalah menggunakan metode deskriptif. Menurut Adiputra (2021) penelitian deskriptif adalah penelitian yang memiliki tujuan untuk menggambarkan suatu fenomena yang sesuai dengan kenyataannya, seperti fenomena buatan manusia atau alam, biasanya digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis hasil subjek namun tidak memberikan implikasi yang luas. Definisi lain mengatakan *Qualitative methods prioritize research in natural or naturalistic conditions of objects, where the researcher is the key instrument, data analysis is inductive, and research results emphasize meaning rather than generalization* (Rohmadin, 2024). According to Fernandes (2017: p. 215), in qualitative research on public administration, data is collected using interviews, observation, documentation, and focus group discussions, and is improved by triangulation (Simangunsong et al., 2025). Penelitian deskriptif muncul akibat adanya berbagai pertanyaan sesuai dengan pentingnya masalah yang akan diambil. Penulis mengumpulkan data melalui dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data dilaksanakan dengan wawancara yang dilakukan kepada beberapa masyarakat yang berkaitan dengan stunting seperti penderita stunting, orang tua asuh, dan sebagainya, serta kepada kepala dinas kesehatan, bidang kesehatan masyarakat, puskesmas yang ditunjuk sebagai ahli gizi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis *collaborative governance* pada pelaksanaan program dalam penanganan stunting di Kabupaten Malaka yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Kondisi Awal

Kondisi awal merupakan suatu permasalahan sebelum adanya perbaikan melalui kebijakan yang dilakukan dengan relasi antara stakeholder untuk menghasilkan suatu bentuk hubungan asimetris dalam relasi yang sedang dijalankan. Adapun indikator dalam dimensi kondisi awal yaitu prasejarah atau awal proses kolaborasi, kemampuan pemangku kepentingan, serta insentif dan kendala aktif partisipasi (Ansell dan Gash, 2008).

Pada dimensi kondisi awal, proporsi pada indikator kemampuan pemangku kepentingan paling sering dibahas dibandingkan dengan indikator lainnya, sehingga indikator ini yang mendominasi dibandingkan dengan indikator prasejarah. Dari dimensi ini ditemukan adanya kekurangan pada keaktifan partisipasi sehingga tidak adanya hak dan tanggung jawab yang sama oleh stakeholder dalam berkolaborasi.

3.2. Kepemimpinan Fasilitatif

Kepemimpinan fasilitatif merupakan suatu unsur yang penting karena fasilitator memiliki peran dalam memastikan integritas membangun suatu sistem pemerintahan. Suatu pemerintahan akan mengalami kesuksesan jika dapat menggunakan kolaborasi antara pemangku kepentingan yang tidak tunggal dan bersifat formal dan informal, dimana terdiri dari unsur pemerintahan dan non

pemerintahan, karena tidak dapat jika hanya mengandalkan satu pemimpin saja. Indikator dalam dimensi ini adalah manajemen terhadap proses kolaborasi, dan memastikan kolaborasi diberdayakan dalam membuat keputusan (Ansell & Gash, 2008).

Dimensi kepemimpinan fasilitatif, melalui pertemuan rutin yang dilakukan para pemangku kepentingan telah berupaya untuk melaksanakan program penanganan Stunting sesuai dengan prioritas masing-masing.

3.3. Desain Kelembagaan

Desain kelembagaan ini merupakan aspek penting yang perlu menjadi perhatian, dalam hal ini terdapat pada kejelasan aturan dan prosedur. Peraturan harus ditegakkan secara adil, transparan dan terbuka, sehingga para pemangku kepentingan dapat meyakini bahwa setiap musyawarah dan negosiasi yang dilakukan adalah nyata dan bukan sekedar basa-basi untuk menutupi kesepakatan rahasia. Indikatornya adalah inklusivitas partisipatif, eksklusivitas forum, aturan dasar yang jelas dan proses yang transparan (Ansell dan Gash, 2008).

Dimensi desain kelembagaan, proporsi indikator transparansi proses lebih dominan dibanding indikator lainnya. Temuan pada dimensi ini yaitu, aturan yang digunakan cukup banyak dan terstruktur mulai dari PERPRES, INPRES, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, dan Keputusan Bupati Kabupaten Malaka, sedangkan SOP untuk melaksanakan program tidak semuanya ada.

3.4. Proses Kolaborasi

Proses kolaborasi merupakan suatu proses yang dilakukan oleh seluruh stakeholder dalam melakukan suatu kegiatan pemutusan kebijakan. Indikator membentuk kolaboratif tersebut adalah dialog tatap muka (*face to face*), membangun kepercayaan (*trust building*), komitmen terhadap proses (*commitment to process*), pemahaman bersama, dan hasil sementara. Dimana dalam hal kolaborasi ini dibentuk tim yang mengacu pada peraturan perundang undangan yang berlaku mengenai masalah kolaborasi tertentu yang mengatur tugas dan peran masing-masing pemangku kepentingan (Ansell & Gash, 2008).

Dimensi proses kolaborasi, proporsi indikator hasil sementara lebih sering dibahas oleh informan dibandingkan dengan indikator lainnya. Dimana terdapat keseimbangan pemangku kepentingan dalam melaksanakan programnya masing-masing namun belum adanya evaluasi bersama dari setiap pemangku kepentingan.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan aplikasi Nvivo 12. Nvivo adalah program yang mendukung penelitian kualitatif yang dirancang untuk membantu pengguna mengatur, menganalisis, dan mengemukakan wawasan dalam data tidak terstruktur seperti wawancara, artikel, media sosial, konten web, dan sebagainya. Kemampuan Nvivo adalah mengatur semua data penelitian dalam sebuah tempat, mengimpor atau membuat tempat untuk sumber materi, memberi kode pada data sumber sesuai topik, memberi kode cepat, mencatat ide dan pengamatan, membuat model konsep berdasarkan data, dan membuat tampilan laporan (Wahid, 2023). Berdasarkan analisa yang telah dilakukan oleh penulis melalui Nvivo 12 pada penjelasan sebelumnya, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan mengenai Collaborative Governance Dalam Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan dimensi-dimensi. Dimensi kondisi awal, proporsi indikator kemampuan pemangku kepentingan merupakan indikator yang sering

dibahas dilanjut dengan prasejarah atau awal kolaborasi. Temuan pada dimensi ini adanya kekurangan pada indikator insentif dan kendala aktif partisipasi yang memiliki kekurangan yaitu tidak adanya hak dan tanggung jawab yang sama dalam berkolaborasi. Dimensi kepemimpinan fasilitatif, dimensi ini hanya satu indikator yaitu peran pemangku kepentingan. Pada hasil word frequency query kata “program” adalah kata yang sering muncul membahas terkait program prioritas penanganan stunting yaitu salah satu upaya penurunan stunting di Kabupaten Malaka. Dimensi desain kelembagaan, proporsi yang didapat melalui hierarchy chart adalah transparansi proses lebih dominan dibanding indikator lainnya. Temuan melalui indikator aturan-aturan yang jelas pada program ini aturan yang digunakan hanya SK TPPS Kabupaten Malaka, dan SOP untuk melaksanakan program tidak ada. Dimensi proses kolaborasi, proporsi yang didapat melalui hierarchy chart adalah indikator hasil sementara lebih sering dibahas oleh informan. Hasil sementara yang didapatkan adalah terdapat satu pemangku kepentingan yang terlalu dominan yaitu TP PKK serta aturan-aturan kurang lengkap untuk program penanganan stunting karena hanya menggunakan SK TPPS di Kabupaten Malaka nomor 188/133/KEP/413.013/2022 serta tidak memiliki SOP program - program dalam penanganan stunting di Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat partisipasi masyarakat di Kabupaten Malaka dalam program penanganan stunting yakni kesibukan para orangtua anak stunting, tingkat kesadaran yang masih rendah, dan kurangnya sarana dan prasarana pendukung.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Pada dimensi kondisi awal, proporsi pada indikator kemampuan pemangku kepentingan paling sering dibahas dibandingkan dengan indikator lainnya, sehingga indikator ini yang mendominasi dibandingkan dengan indikator prasejarah. Dari dimensi ini ditemukan adanya kekurangan pada keaktifan partisipasi sehingga tidak adanya hak dan tanggung jawab yang sama oleh stakeholder dalam berkolaborasi. Dimensi kepemimpinan fasilitatif, melalui pertemuan rutin yang dilakukan para pemangku kepentingan telah berupaya untuk melaksanakan program penanganan Stunting sesuai dengan prioritas masing-masing. Dimensi desain kelembagaan, proporsi indikator transparansi proses lebih dominan dibanding indikator lainnya. Temuan pada dimensi ini yaitu, aturan yang digunakan cukup banyak dan terstruktur mulai dari PERPRES, INPRES, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, dan Keputusan Bupati Kabupaten Malaka, sedangkan SOP untuk melaksanakan program tidak semuanya ada. Dimensi proses kolaborasi, proporsi indikator hasil sementara lebih sering dibahas oleh informan dibandingkan dengan indikator lainnya. Dimana terdapat keseimbangan pemangku kepentingan dalam melaksanakan programnya masing-masing namun belum adanya evaluasi bersama dari setiap pemangku kepentingan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada dua OPD saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Creswell

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan kolaborasi penanganan stunting di Kabupaten Malaka untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas DP3AKB Kabupaten Malaka beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- AlfaFatikha, dkk. (2023). *Collaborative Governance* Dalam Penanganan Stunting. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Ansell dan Gash. 2008. *Collaborative Governance* in Theory and Practice, *Journal of Public Administration Research and Theory*. Volume; 543 571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Bhutta, Z. A., Akseer, N., Keats, E. C., Vaivada, T., Baker, S., Horton, S. E., Katz, J., Menon, P., Piwoz, E., Shekar, M., Victora, C., & Black, R. (2020). How countries can reduce child stunting at scale: Lessons from exemplar countries. *American Journal of Clinical Nutrition*, 112, 894S-904S. <https://doi.org/10.1093/ajcn/nqaa153>
- Faidati, Nur dan Sukanti. (2021). *Collaborative Governance* Dalam Upaya Penanggulangan Stunting di Kabupaten Sleman. Yogyakarta: Universitas Aisyiyah Yogyakarta.
- Faldianus, Alvino Latu. (2022). *Collaborative Governance* Dalam Upaya Penanggulangan Masalah Stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kupang: Universitas Nusa Cendana.
- Hidayasa, dkk. (2023). *Collaborative Governance* Dalam Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Bintan. Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Ipan, dkk. (2021). *Collaborative Governance* dalam Penanganan Stunting. Karawang: Universitas Singaperbangsa.
- Leroy, J. L., & Frongillo, E. A. (2019). Perspective: What Does Stunting Really Mean? A Critical Review of the Evidence. *Advances in Nutrition*, 10(2), 196–204. <https://doi.org/10.1093/advances/nmy101>
- Nuranita Putri, Evalia dan Nurcahyanto, Herbasuki. (2021). *Collaborative Governance* Dalam Penanggulangan Stunting di Desa Kalirandu Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Pusung, P.H. *et al.* (2024) ‘Mapping environmental problems in the new capital city of “Nusantara” as a foundation for sustainable development governance’, *Environment and Social Psychology*, 9(2), pp. 1–10. Available at: <https://doi.org/10.54517/esp.v9i2.1808>.
- Rohmadin, S. (2024). *Analysis of The Formation of Regional Apparatus Organizations in The City of Surakarta : Authority Perspective , Regional Vision and Mission , Regional Characteristics and Community Needs*. 9(3). <http://dx.doi.org/10.31506/jog.v9i3.28282>.
- Saufi, Ahmad. (2021). *Dinamika Collaborative Governance* dalam Penanggulangan Stunting Ditengah Pandemi Covid-19. Lembaga Pengembangan Masyarakat Equator.
- Simangunsong, F., Hutasoit, I., & Jafa, B. J. (2025). *Dynamic Governance in Reducing Stunting in Manggarai Regency , East Nusa Tenggara Province , Indonesia*. 12, 1–16. <https://doi.org/10.4236/oalib.1112336>
- Siswati, T. (2018). *Stunting*. Husada Mandiri Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.
- Siswanto, dkk. (2013). *Bunga Rampai Kinerja Pembangunan Kesehatan Indonesia*. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemetrian Kesehatan Republik Indonesia.

- Sutikno, Chamid dan Naufal, Alban. (2023) Proses Collaborative Governance Penanggulangan Stunting di Desa Winduaji Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes. Purwokerto.
- UNICEF. (2020). Situasi Anak di Indonesia. Jakarta: UNICEF Indonesia.
- Kemenkes RI. (2022). Survei Status Gizi Indonesia (SSGI). Jakarta: Kemenkes RI.
- Keputusan Bupati Malaka Nomor 188/133/KEP/413.013/2022 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting.
- Kurniasih, dkk. (2023). Collaborative Governance Dalam Percepatan Stunting di Kabupaten Temanggung. Magelang: Universitas Tidar.
- Vaivada, T., Akseer, N., Akseer, S., Somaskandan, A., Stefopoulos, M., & Bhutta, Z. A. (2020). Stunting in childhood: An overview of global burden, trends, determinants, and drivers of decline. *American Journal of Clinical Nutrition*, 112, 777S-791S. <https://doi.org/10.1093/ajcn/nqaa159>
- Wahid, Kusuisyanah, Sirait dan Umbar. (2023). Analisis Data Kualitatif Menggunakan Nvivo. Publica Indonesia Utama
- World Health Organization. (2014). *Global nutrition targets 2025: Stunting policy brief* (No. WHO/NMH/NHD/14.3). World Health Organization.